

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Kemiskinan telah membuat pengangguran semakin bertambah banyak, inflasi juga naik dan pertumbuhan ekonomi melambat. Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara memang perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius, karena saat ini kemiskinan membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Persoalan kemiskinan ini lebih dipicu karena masih banyaknya masyarakat yang mengalami pengangguran dalam bekerja. Pengangguran yang dialami sebagian masyarakat inilah yang membuat sulitnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga angka kemiskinan selalu ada.

Indikator statistik tentang angka kemiskinan di Yogyakarta menunjukkan bahwa hingga tahun 2008 jumlah penduduk miskin mencapai 81.334 jiwa yang berasal dari 24.427 KK atau 16,34%, masih berada dibawah garis kemiskinan yang ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-/bulan. Jumlah tersebut menurun pada tahun 2009 yakni, 21.228 kepala keluarga (KK) atau 68.998 jiwa atau 15,24 %. Jadi, Jumlah warga yang miskin di Yogyakarta tahun 2009 lalu menurun drastis hingga 12.336 jiwa yang berasal dari 3.199 keluarga miskin dengan indikator pendapatan per kapita Rp. 200.000,-/bulan. Penurunan angka warga keluarga miskin di Yogyakarta karena adanya perpindahan penduduk dari Yogyakarta ke daerah lain

dan akibat keberhasilan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan beberapa dinas di Pemerintah Provinsi DIY.

Jumlah penduduk miskin, yaitu penduduk yang konsumsinya berada di bawah garis kemiskinan, pada Maret 2015 di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 550,23 ribu orang. Bila dibandingkan keadaan Maret 2014 yang jumlah penduduk miskinnya mencapai 544,87 ribu orang, maka selama satu tahun terjadi peningkatan sebesar 5,34 ribu jiwa. Tingkat kemiskinan yaitu persentase penduduk miskin dari seluruh penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Maret 2015 sebesar 14,91 persen. Apabila dibandingkan dengan keadaan Maret 2014 yang besarnya 15,00 persen berarti ada penurunan sebesar 0,09 poin selama satu tahun. Sedangkan bila dibandingkan dengan kondisi September 2014 dengan persentase penduduk miskin sebesar 14,55 persen, terjadi kenaikan sebesar 0,36 poin. Garis kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Maret 2015 sebesar Rp 335.886,- per kapita per bulan. Sementara garis kemiskinan pada Maret 2014 sebesar Rp 313.452,- per kapita per bulan, atau garis kemiskinan mengalami kenaikan sekitar 7,16 persen. Bila dibandingkan kondisi September 2014 yang sebesar Rp 321.056,- per kapita per bulan maka dalam kurun satu semester terjadi kenaikan sebesar 4,62 persen (<http://yogyakarta.bps.go.id/Brs/view/id/216>).

Dinsosnakertrans sendiri ada program pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE). Kelompok ini memperoleh pendampingan dan modal kerja secara bergulir dari Pemerintah Provinsi DIY. Secara rinci, berdasarkan laporan tersebut, warga yang pindah ke daerah lain sekitar 889 KK, meninggal tanpa anggota keluarga 385 KK, data ganda 14 KK, dan dinyatakan tidak miskin lagi 3.970 KK

sehingga jumlah total data keluarga miskin 2008 yang tidak lagi miskin 5.244 KK, dan selain itu berdasarkan hasil penelusuran dan laporan warga diketahui ada 2.045 KK yang terdata tidak miskin (Abisono, 2011).

Rata-rata angka kemiskinan di Provinsi DIY itu lebih tinggi dari angka kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) karena survei yang dilakukan didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah DIY. Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DIY dalam menetapkan keluarga miskin adalah didasarkan pada inventarisasi sasaran program yang ingin dicapai oleh pemerintah. Pemerintah Provinsi DIY menerapkan parameter yang berbeda dari tahun 2008 lalu dalam menentukan keluarga atau warga tersebut tergolong miskin atau tidak. Beberapa parameter yang berbeda adalah penghasilan keluarga, jika tahun 2008 lalu rata-rata Rp 150 ribu/bulan tahun 2009 dinaikan menjadi Rp 200 ribu/bulan. Sementara indeks kedalaman kemiskinan mencapai 2,10 dan indeks keparahan kemiskinan mencapai 0,44 pada tahun yang sama. Terkait dengan indikator status gizi, hingga tahun 2009 terdapat 1,04 % balita yang mengalami gizi buruk dan 9,61 % mengalami gizi kurang. Persentase ini masih diatas target persentase yang ditetapkan pemerintah Kota Yogyakarta yakni dibawah 0,9 % pada tahun 2011 (Abisono, 2011).

Perhatian pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan pada pemerintahan reformasi terlihat besar lagi setelah terjadinya krisis ekonomi. Meskipun demikian, berdasarkan penghitungan BPS, persentase penduduk miskin di Indonesia sampai Tahun 2003 masih tetap tinggi sebesar 17,4 persen, dengan jumlah penduduk yang lebih besar, yaitu 37,4 juta orang. Bahkan, berdasarkan

angka Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada Tahun 2001, persentase keluarga miskin (keluarga prasejahtera dan sejahtera I) pada 2001 mencapai 52,07 persen, atau lebih dari separuh jumlah keluarga di Indonesia. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan banyak ekonom yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya mengurangi penduduk miskin.

Pada dasarnya ada dua faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pertama, program-program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin. Hal itu antara lain, berupa beras untuk rakyat miskin dan program jaring pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pembangunan tidak selalu berjalan secara sistemik. Beberapa daerah mengalami pertumbuhan yang cepat, sedangkan daerah lain mengalami pertumbuhan yang lebih lambat. Pertumbuhan yang tidak merata dan distribusi pendapatan yang tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi mayoritas pembangunan daerah di Indonesia saat ini. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya kecenderungan peranan modal yang lebih memilih daerah perkotaan atau daerah yang telah memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan (transportasi), telekomunikasi, jaringan listrik, dan lain-lain.

Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini justru dapat memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin. Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen. Di lain pihak, program-program bantuan sosial ini juga dapat menimbulkan korupsi dalam penyalurannya. Hal yang dapat mengakibatkan gagalnya program penanggulangan kemiskinan adalah kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri sehingga program-program pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan, yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal.

Angka pertumbuhan jauh lebih mengkhawatirkan dari angka pertumbuhan penduduk yang menurut perhitungan pemerintah masih 'aman' untuk kondisi Indonesia. Aman dalam konteks rasio pertumbuhan ekonomi berbanding jumlah per kapita, aman pula dari perspektif pencapaian tujuan pembangunan untuk mengangkat rakyat dari kubangan kemiskinan. Situasi ini secara paralel akan membuat peningkatan kesejahteraan rakyat kian sulit tercapai. Efek lebih jauh adalah dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, maka akan berakibat pada tingkat pendidikan masyarakat semakin turun, sehingga kemiskinan akan kian sulit diberantas, karena itu, mata rantai sebab akibat ini harus diputus (Kompas, 2006).

Pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diperlukan guna mempercepat struktur perekonomian yang berimbang dan dinamis bercirikan industri yang kuat dan maju, pertanian

yang tangguh serta memiliki basis pertumbuhan sektoral yang seimbang. Pertumbuhan ekonomi juga diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi kesenjangan sosial ekonomi.

Fenomena kemiskinan di Yogyakarta merupakan fenomena yang kompleks dan tidak dapat secara mudah dilihat dari satu angka absolut. Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar dan kota wisata seiring dengan perkembangan kota memiliki daya tarik yang kuat terhadap urbanisasi yang berpengaruh terhadap jumlah penduduk. Keberagaman budaya masyarakat yang menyebabkan kondisi dan permasalahan kemiskinan dan pengangguran di Yogyakarta menjadi sangat beragam dengan sifat-sifat lokal yang kuat serta pengalaman kemiskinan yang berbeda secara sosial maupun antara laki-laki dan perempuan (Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 616/KEP/2007).

Kemiskinan di Provinsi DIY disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu rata-rata lama sekolah yang masih rendah, tingkat pengangguran yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. seseorang dikatakan miskin bila dia belum bisa mencukupi kebutuhannya atau belum berpenghasilan. Menurut Kuncoro dalam Dwi, 2010: 33) semua ukuran kemiskinan didasarkan pada konsumsi terdiri dari dua elemen yaitu, (1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya; dan (2) jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bagian pertama relatif jelas. Biaya untuk mendapatkan kalori minimum dan kebutuhan lain dihitung dengan melihat harga-harga

makanan yang menjadi menu makanan golongan kaum miskin. Adapun elemen kedua sifatnya lebih subjektif.

Berdasarkan fenomena di atas mendorong peneliti untuk melihat bagaimana hubungan antara pertumbuhan ekonomi, rata-rata lama sekolah, dan tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi DIY. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan mengambil judul **"Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Rata-rata Lama Sekolah, dan Tingkat Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi DIY"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini :

- a. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi DIY?
- b. Bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi DIY?
- c. Bagaimana pengaruh jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi DIY?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

- a. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi DIY.
- b. Pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi DIY.
- c. Pengaruh jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi DIY terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi DIY.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai:

- a. Masukan dinas pemerintahan terkait yang ada di Provinsi DIY dalam menentukan kebijakan untuk pegendalian angka kemiskinan berkaitan dengan dampak pertumbuhan ekonomi, rata-rata lama sekolah, dan jumlah pengangguran terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin.
- b. Dapat menjadi tambahan wawasan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dan bagi yang membacanya.
- c. Salah satu syarat memperoleh derajat S1 pada program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.